



Warga Asli Jangan Sampai Tersingkir

DPRD Desak Pengawasan Ketat Praktik Titip KK saat SPMB 2026

JOGJA - Fenomena titip kartu keluarga (KK) atau manipulasi data yang kerap muncul saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang kini dikenal dengan sistem penerimaan murid baru (SPMB) kembali menjadi sorotan. DPRD Kota Jogja mendesak adanya validasi berlipis dan verifikasi lapangan agar praktik manipulasi domisili tidak merugikan warga yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah. Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro mengatakan, validasi data KK berlipis perlu untuk memastikan PPDB tahun ini berjalan adil dan transparan. Sehingga fenomena titip KK yang sering menjadi celah bagi calon siswa di luar domisili sekitar sekolah untuk masuk ke zona sekolah favorit tidak lagi terjadi. "Jangan sampai warga asli yang berdomisili di sekitar sekolah justru tersingkir oleh mereka yang hanya menumpang alamat," ujar Kuncoro, kemarin (12/6).

Kuncoro menekankan, fenomena titip KK memang menjadi persoalan yang tidak jarang merugikan. Apalagi bagi para siswa yang memang merupakan penduduk asli dan bertempat tinggal di sekitar sekolah. Baik itu di sekolah yang dianggap favorit maupun tidak.

Polifisi yang akrab disapa Pak Ustad itu sangat berharap pada PPDB tahun ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja bisa berkoordinasi dengan organisasi

perangkat daerah (OPD) lain untuk melakukan pengawasan. Di samping itu, ada imbauan agar seluruh orang tua dan wali murid patuh terhadap prosedur PPDB yang berlaku.

Selain mewanti-wanti fenomena titip KK, Kuncoro juga meminta dalam PPDB tahun ini hak kelompok rentan juga diperhatikan. Pasalnya, tidak jarang penyandang disabilitas dan masyarakat miskin menghadapi berbagai kendala administratif selama proses pendaftaran. "Hak pendidikan itu setara dan harus inklusif. Kuota afirmasi untuk siswa dari keluarga rentan ekonomi maupun penyandang disabilitas tidak boleh sekadar angka formalitas di sistem," tegas anggota dewan dari fraksi PKS itu.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Kota Jogja Budi Santosa Asrori memastikan aturan terkait dengan domisili calon peserta didik telah diatur secara ketat. KK yang digunakan sebagai syarat pendaftaran di suatu wilayah harus sudah tercatat minimal selama satu tahun.

Selain secara administrasi, Budi juga akan melakukan verifikasi terhadap calon siswa yang mendaftar melalui jalur domisili. Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran domisili calon siswa.

Disinggung perihal kondisi siswa yang tinggal bersama anggota keluarga di luar orang tua, dipastikan selama calon siswa tercantum dalam KK dan tercatat tinggal minimal satu tahun maka sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. "Sesuai dengan KK yang ada, prinsipnya itu," tegas Budi. (Imu/wia/by)



CARI INFORMASI: Petugas memberikan penjelasan kepada orang tua calon siswa terkait proses SPMB di Kantor Disdikpora Kota Jogja, kemarin (12/6).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005